

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2025**



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025, sebagai penjabaran dari aktivitas selama tahun pelaksanaan pembangunan dan merupakan amanat dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 bahwa Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan, sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan selama satu tahun.

Rencana Kinerja Tahunan memuat sasaran, indikator kinerja dan target yang harus dicapai pada tahun 2025, dengan harapan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka merencanakan pembangunan daerah dan menciptakan *good governance* khususnya di lingkungan Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara.

Akhir kata, kami berharap dengan adanya dokumen ini dapat memperoleh umpan balik yang bermanfaat guna mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tenggarong, 21 Januari 2025
Kepala Badan Kesbangpol
Kabupaten Kutai Kartanegara,

RINDA DESIANTI, S.Sos.,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19691226 200112 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi	3
BAB II RENCANA STRATEGIS	5
2.1 Perencanaan Strategis Tahun 2021 – 2026	5
2.2 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025	13
BAB III PENUTUP	15
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
MATRIK RENCANA KINERJA TAHUNAN 2025	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Untuk menjamin tercapainya pelaksanaan tugas dan kegiatan Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan yang telah dirumuskan pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, maka disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT). RKT merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu. RKT menuntut konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan proses dan ketentuan dalam Renja dan Renstra sehingga diperlukan kompetensi, profesionalisme, dan disiplin pegawai dilingkungan Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan kegiatannya.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa dokumen RKT adalah tolok ukur untuk mencapai akuntabilitas kinerja instansi, pertanggungjawaban pencapaian visi, misi, dan tujuan Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara, serta sebagai dasar dalam penetapan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 bagi Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara kepada Bupati

1.2 DASAR HUKUM

Dasar hukum dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- 1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

1.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Peraturan Bupati Nomor 41 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Dengan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai berikut :

Kedudukan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintah Daerah, di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, dipimpin oleh Kepala Badan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas dan Fungsi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai Tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Dalam menyelenggarakan Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai fungsi yang meliputi :

- 1) Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;

- 2) Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 4) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di Bidang Politik Dalam Negeri;
- 5) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
- 6) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- 7) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2021-2026

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan pernyataan komitmen bersama jangka menengah mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pengelolaan manajemen internal yang terpadu dan sistematis, sarana prasarana kerja yang memadai sehingga menciptakan suasana kerja yang kondusif, pengelolaan anggaran yang akuntabel, manajemen kepegawaian yang handal dan profesional, sistem perencanaan yang tepat dan akurat, penyusunan bahan kebijakan yang tepat dan akurat, agar tercapai efektivitas, efisiensi dan produktivitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara.

Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesbangpol telah mengacu pada dokumen perencanaan di atasnya yaitu RPJMD Tahun 2021 – 2026 dan dalam pelaksanaannya, Rencana Strategis Badan Kesbangpol tahun 2021 – 2026 telah mengalami beberapa perubahan dengan tuntutan perubahan internal maupun eksternal. Demikian juga dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan

Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan. Secara ringkas substansi Renstra Badan Kesbangpol dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.1.1 Visi dan Misi

Dalam mewujudkan visi Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2021-2026, visi Perangkat Daerah telah selaras dengan visi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara yaitu :

***“Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara
Yang Sejahtera dan Berbahagia”***

Guna mewujudkan visi Kabupaten Kutai Kartanegara 2021 – 2026 diatas, maka disusunlah misi yang menjadi tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan misi ini diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran serta instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahannya. Oleh karena itu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara perwujudan *Misi Kesatu* dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai berikut :

“Memantapkan Birokrasi yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani”

Dalam penjabaran misi tersebut Badan Kesbangpol telah menuangkan ke dalam tujuan dan sasaran OPD sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi

2.1.2 Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan tersebut dirumuskan selaras dengan visi, misi dan prioritas yang akan dicapai. Sebagaimana visi dan misi RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

MISI 1 RPJMD	TUJUAN MISI 1 RPJMD	TUJUAN SKPD	INDIKATOR TUJUAN
1. Memantapkan Birokrasi yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani.	1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan	1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan Badan Kesbangpol	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Kesbangpol
		2. Terwujudnya Situasi yang Kondusif di Kabupaten Kutai Kartanegara	Persentase permasalahan ipoleksosbudhankam yang diselesaikan

2.1.3 Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintahan dalam urusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

SASARAN RPJMD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN
1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan	1. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.	Predikat Akuntabilitas Kinerja Badan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan	1. Meningkatnya Keamanan,	Penurunan Jumlah Konflik dan Gejolak

Pelayanan Publik	Kenyamanan dan Ketertiban Masyarakat	
	2. Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Wawasan Kebangsaan dan Pancasila serta Ormas	Persentase aparaturn dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan dan Pancasila Serta Ormas
	3. Meningkatnya Kualitas Demokrasi di Daerah	Persentase Pemahaman Aparatur dan Masyarakat Terhadap Demokrasi

2.1.4 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi Merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara.

STRATEGI (ARAH DAN KEBIJAKAN OPD)

Strategi SKPD	Arah Kebijakan SKPD
Peningkatan Fasilitas Penyelenggaraan Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Peningkatan upaya pencegahan dan penanganan konflik dan gejolak di Masyarakat
	Peningkatan pelaporan deteksi dini situasi Ipoleksosbudhankam
	Peningkatan pengawasan terhadap orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing
Peningkatan Fasilitas Penyelenggaraan Politik Dalam Negeri	Peningkatan upaya penyuluhan pendidikan politik bagi masyarakat
	Peningkatan pelaporan perkembangan politik di daerah
	Penguatan kapasitas kelembagaan parpol
	Peningkatan fasilitasi pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan Pemilu
Peningkatan Fasilitas Penyelenggaraan Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Peningkatan pembinaan tentang wawasan kebangsaan dan pancasila kepada aparatur dan masyarakat
Peningkatan Fasilitas Penyelenggaraan Ketahanan	Peningkatan pembinaan tentang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya

Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Ormas	
	Penguatan kapasitas dan pengawasan organisasi kemasyarakatan
	Peningkatan fasilitasi pemerintah daerah terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba

2.1.5 Program dan Kegiatan

Program yang dilaksanakan untuk mendukung capaian sasaran strategis pada tahun 2023, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Keselarasan Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM
1. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.	Predikat Akuntabilitas Kinerja Badan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan dan Ketertiban Masyarakat	Penurunan Jumlah Konflik dan Gejolak	Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
3. Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap	Persentase aparaturnya dan masyarakat yang memiliki pemahaman	a. Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

Wawasan Kebangsaan dan Pancasila serta Ormas	wawasan kebangsaan dan Pancasila Serta Ormas	
		b. Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
		c. Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
4. Meningkatnya Kualitas Demokrasi di Daerah	Persentase Pemahaman Aparatur dan Masyarakat Terhadap Demokrasi	a. Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

PROGRAM RENJA KESBANGPOL TAHUN 2025

Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator
Peningkatan Fasilitas Penyelenggaraan Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Peningkatan upaya pencegahan dan penanganan konflik dan gejolak di masyarakat	Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan	Persentase Penanganan Konflik dan Gejolak Masyarakat

	Peningkatan pelaporan deteksi dini situasi Ipoleksosbudhankam	Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	yang ditindaklanjuti
	Peningkatan pengawasan terhadap orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing		
Peningkatan Fasilitasi Penyelenggaraan Politik Dalam Negeri	Peningkatan upaya penyuluhan pendidikan politik bagi masyarakat	Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Cakupan Layanan Pendidikan Politik Daerah
	Peningkatan pelaporan perkembangan politik di daerah		
	Penguatan kapasitas kelembagaan parpol		
	Peningkatan fasilitasi pemerintah daerah		

	terhadap penyelenggaraan Pemilu		
Peningkatan Fasilitas Penyelenggaraan Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Peningkatan pembinaan tentang wawasan kebangsaan dan pancasila kepada aparatur dan masyarakat	1. Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan
Peningkatan Fasilitas Penyelenggaraan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Ormas	Peningkatan pembinaan tentang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	2. Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman ketahanan ekososbud
	Peningkatan fasilitas pemerintah daerah terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba	3. Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas	Persentase ormas yang tertib administrasi
	Penguatan kapasitas dan		

	pengawasan organisasi kemasyarakatan		
--	--	--	--

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA, dengan Kegiatan :

a. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :

- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :

- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan Sub Kegiatan :
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN, dengan Kegiatan :
- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, dengan Sub Kegiatan :
- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
3. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK, dengan Kegiatan :
- a. Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik, dengan Sub Kegiatan :
- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
 - Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
4. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN, dengan Kegiatan :

a. Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, dengan Sub Kegiatan :

- Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA, dengan Kegiatan :

a. Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya, dengan Sub Kegiatan :

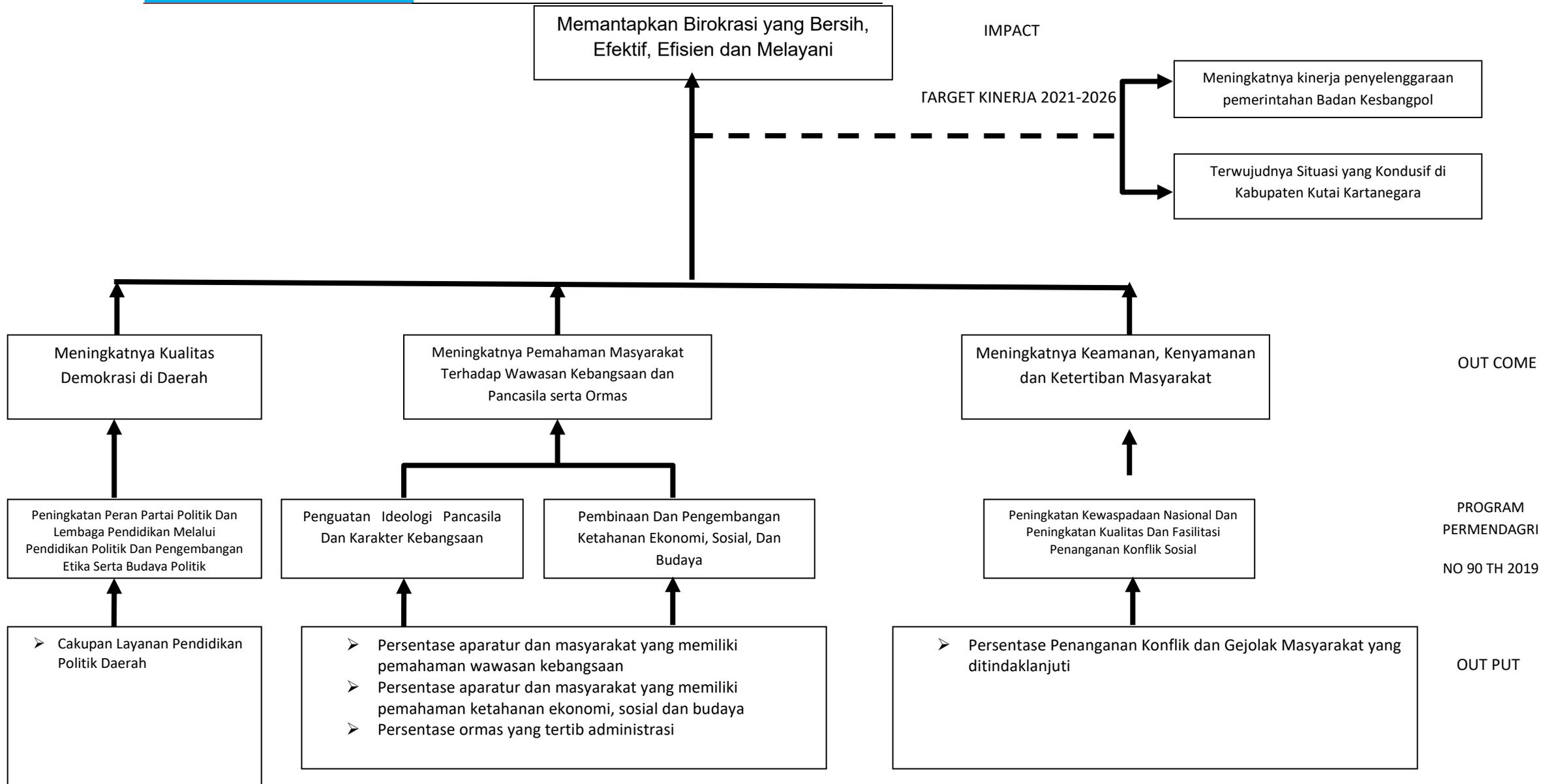
- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

6. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL, dengan kegiatan :

a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial, dengan Sub Kegiatan :

- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
- Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tentunya hasil akhir yang diharapkan adalah hasil atau dampak yang diharapkan akan tercapai dalam masyarakat, berikut diagram impact Badan Kesbangpol :



2.2 RENCANA KINERJA TAHUN 2025

2.2.1 Rencana Kinerja Tahunan

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan jangka menengah sebagaimana yang diuraikan dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021 – 2026 dan mendukung kegiatan dan program pembangunan tersebut, dialokasikan pembiayaannya melalui Rencana Kerja Tahun 2025 yang merupakan acuan pelaksanaan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2025 yang berisi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan lingkup Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Berangkat dari hal tersebut diatas, maka pada Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol	Predikat Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol	64,00
2	Meningkatnya keamanan, kenyamanan dan ketertiban Masyarakat	Penurunan Jumlah Konflik dan Gejolak	20 kejadian
3	Meningkatnya Kualitas Demokrasi di Daerah	Persentase Pemahaman Aparatur dan Masyarakat Terhadap Demokrasi	5,62%
4	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Wawasan Kebangsaan dan Pancasila serta Ormas	Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan dan Pancasila Serta Ormas	3,63%

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan tersebut Badan Kesbangpol Tahun 2025 disusun Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Kemudian dianalisis dalam bentuk Pengukuran Pencapaian Sasaran Badan Kesbangpol sebagai instrumen dalam melakukan evaluasi dalam penyusunan LKjIP Badan Kesbangpol Tahun 2025.

2.2.2 Indikator Kinerja Utama

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan parameter serta acuan dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2025 yang juga merupakan kelanjutan dari indikator kinerja utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada periode Renstra Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol	Predikat Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol	Kesbangpol
2	Meningkatnya keamanan, kenyamanan dan ketertiban masyarakat	Penurunan Jumlah konflik dan gejolak	Kesbangpol, Kepolisian dan TNI
3	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Wawasan Kebangsaan dan Pancasila serta Ormas	Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan dan Pancasila Serta Ormas	Kesbangpol
4	Meningkatnya Kualitas Demokrasi di Daerah	Persentase Pemahaman Aparatur dan Masyarakat Terhadap Demokrasi	Kesbangpol dan Komisi Pemilihan Umum

BAB III

P E N U T U P

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 ini merupakan komitmen Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*clean government*) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Adapun dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Perencanaan kinerja merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapai sasaran dan program yang telah ditetapkan pada tahun yang direncanakan.

Rencana kinerja ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumberdaya manusia dan potensi yang ada, dengan harapan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka merencanakan pembangunan daerah khususnya di lingkungan Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara. Dimana keberhasilan suatu organisasi tidak hanya diukur dari habisnya anggaran yang telah dialokasikan, tetapi difokuskan pada pada aspek efisiensi yang dapat dicapai, kualitas output yang dihasilkan serta efektivitas mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan tersusunya Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2025.

Tenggarong, 21 Januari 2025

Kepala Badan Kesbangpol
Kabupaten Kutai Kartanegara,

RINDA DESIANTI, S.Sos., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19691226 200112 2 002

**FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN**

**: KUTAI KARTANEGARA
: 2025**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
1 Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol	1 Predikat Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol	64,00 Nilai
2 Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan dan Ketertiban Masyarakat	1 Penurunan Jumlah Konflik dan Gejolak	20 kejadian
3 Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Wawasan Kebangsaan dan Pancasila serta Ormas	1 Persentase aparaturnya dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan dan Pancasila Serta Ormas	3,63%
4 Meningkatnya Kualitas Demokrasi di Daerah	1 Persentase Pemahaman Aparatur dan Masyarakat Terhadap Demokrasi	5,62%